

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan:

Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. Belanja modal pada tahun sebelumnya dapat berpengaruh terhadap rasio kemandirian keuangan daerah sesudah satu tahun berikutnya. Peningkatan belanja modal bertujuan untuk menambah sarana dan prasarana pelayanan terhadap masyarakat dalam satu daerah. Kebutuhan akan sarana dan prasarana dapat terpenuhi dalam jangka panjang yang gunannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah kabupaten kota. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah bukan merupakan peningkatan dalam sisi pendapatan sehingga dikatakan bahwa adanya sumber dana yang berasal dari PAD dan bantuan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bentuk pembangunan. Pembangunan membutuhkan dana yang berasal dari keuangan daerah maka dikatakan adanya pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Variabel independen lain untuk investasi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Meningkatnya investasi disuatu daerah dapat menambah sisi pendapatan daerah yang merupakan masukan bagi daerah sehingga daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka daerah tersebut dalam sisi keuangan dikatakan baik. Pertumbuhan ekonomi ini akan menuju pada

kemandirian daerah yang meningkat, dikatakan mandiri dengan tingkat persentase 75-100 sudah dikatakan baik, hasil penelitian bahwa tingkat kemandirian keuangan masih rendah.

Pengaruh belanja modal dan investasi terhadap kemandirian keuangan daerah dapat pula dipengaruhi variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini misal dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, sumber daya manusia yang ada serta faktor keadaan sumber daya alam yang ada di daerah dan luas wilayah suatu daerah.

5.2 Implikasi

Implikasi yang dapat dikaji dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan kabupaten/kota se-Sumatra dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali pendapatannya dan tidak terlalu tergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Belanja modal dalam hal ini perlu ditekan untuk mengurangi dana pemerintah yang membengkak sehingga pengeluaran pemerintah bisa lebih diatur untuk yang penting-penting saja.

Dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu

meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

5.3 Keterbatasan dan Saran

5.3.1 Keterbatasan

Sampel penelitian yang dilakukan hanya se-Sumatera karena keterbatasan peneliti, sebaiknya menggunakan sampel untuk seluruh kabupaten kota se-Indonesia agar hasilnya dapat lebih digeneralisir.

Penelitian ini hanya dilakukan dua periode yaitu tahun 2010 dan 2011 sehingga jangka waktu pengamatannya sangat pendek dan sampel yang mewakili untuk kabupaten kota Se-Sumatera saja yang bisa mewakili sampel.

5.3.2 Saran

Sampel penelitian ini dibatasi pada Kabupaten/Kota se-Sumatra. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian, sehingga belum dapat digeneralisasi untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas dan menggunakan laporan Realisasi APBD yang paling mutakhir untuk dapat menggambarkan kondisi yang paling terbaru.

Penelitian ini mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah selama pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan penelitian selanjutnya dapat membandingkan dua indikator kinerja keuangan daerah tersebut sebelum dan sesudah otonomi daerah.